

Pertamina Tampo Pastikan BBM Aman, Masyarakat Diminta Tidak Ragu

MUNA, Sultranet.com - Depot Terminal Pertamina Tampo memastikan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) yang didistribusikan ke tiga kabupaten, yakni Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah, aman dan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Kepastian ini disampaikan untuk merespons keluhan masyarakat terkait dugaan pencampuran BBM jenis pertalite di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Manajer Depot Terminal Pertamina Tampo, Moh. Ali Hakka, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan inspeksi langsung di lapangan serta pengujian laboratorium terhadap sampel BBM di dua SPBU, yakni SPBU CBK Wamponiki dan SPBU Kambara di Muna Barat. Dari hasil pemeriksaan, kualitas BBM dinyatakan aman dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pertamina.

“Kami langsung turun ke lapangan dan melakukan uji laboratorium untuk memastikan kualitas BBM di beberapa SPBU. Hasilnya menunjukkan bahwa BBM yang didistribusikan tetap terjaga mutunya dan tidak mengalami perubahan kualitas,” ujar Ali Hakka, Kamis (6/3/2025).

Lebih lanjut, Ali Hakka menjelaskan bahwa sistem penerimaan dan distribusi BBM di Depot Terminal Pertamina Tampo dilakukan dengan prosedur yang sangat ketat. Sebelum BBM dibongkar dari kapal ke tower penampungan, dilakukan pemeriksaan sertifikat mutu. Selain itu, pengecekan kembali dilakukan sebelum BBM dikirim ke SPBU guna memastikan tidak ada penyimpangan.

“Kami memiliki standar operasional yang ketat dalam penerimaan BBM dari kapal, termasuk pengecekan dokumen, sertifikasi mutu, serta pengujian ulang sebelum BBM masuk ke dalam tangki penyimpanan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kualitas BBM yang sampai ke masyarakat,” jelasnya.

Ali Hakka menegaskan bahwa apabila ditemukan adanya indikasi manipulasi terhadap kualitas BBM, pihaknya akan mengambil langkah tegas sesuai regulasi

yang berlaku. Pihaknya juga membuka pintu bagi masyarakat untuk melaporkan segala bentuk keluhan terkait kualitas BBM agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Jika ada pihak yang mencoba memanipulasi kualitas BBM di luar jalur distribusi resmi, maka akan ada sanksi tegas. Kami mengimbau masyarakat agar tidak ragu dengan kualitas BBM yang kami distribusikan. Jika ada keluhan, segera laporkan kepada kami agar kami bisa melakukan pengecekan dan mengambil tindakan yang diperlukan,” tegasnya.

Senada dengan pernyataan tersebut, C. - Spv I Receiving, Storage & Distribution, Edwin Prasetyo, menjelaskan bahwa sebelum BBM didistribusikan ke SPBU, dilakukan serangkaian pemeriksaan mutu dan kualitas. Hal ini mencakup pengecekan sebelum BBM dimasukkan ke dalam tangki mobil, serta inspeksi ulang di pintu gerbang keluar untuk memastikan kualitas dan kuantitas BBM tetap sesuai standar Pertamina.

“Kami memastikan setiap BBM yang keluar dari terminal telah melalui serangkaian pengecekan berlapis. Mulai dari tahap awal hingga sebelum mobil tangki keluar dari depot, kami melakukan pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam mutu dan volume BBM yang dikirim,” jelas Edwin.

Selain itu, Terminal Pertamina Tampo juga mendapatkan pengawasan rutin dari pihak berwenang, termasuk dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas). Pengawasan ini dilakukan setiap tahun untuk memastikan seluruh operasional berjalan sesuai standar yang berlaku.

“Setiap tahun, kami selalu menjalani audit dan pengawasan dari pihak terkait guna memastikan bahwa proses distribusi BBM tetap sesuai dengan regulasi dan tidak ada penyimpangan dalam standar operasional kami,” tambahnya.

Sebagai bentuk transparansi, Pertamina Tampo juga mengajak awak media untuk melihat langsung proses pembongkaran BBM di lokasi terminal. Langkah ini bertujuan agar publik dapat memahami secara langsung bagaimana sistem distribusi BBM dijalankan dengan standar tinggi.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Manajer Depot Terminal Pertamina Tampo, Moh. Ali Hakka, C. - Spv I Receiving, Storage & Distribution, Edwin Prasetyo, serta Jr Spv II Maint, Plan. & Sales Services, Husada Hartadi. Mereka

memberikan penjelasan detail mengenai proses penerimaan, penyimpanan, serta distribusi BBM dari Terminal Tampo ke berbagai SPBU di wilayah Muna, Muna Barat, dan Buton Tengah.

Dengan berbagai langkah pengawasan dan prosedur ketat yang diterapkan, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terhadap kualitas BBM yang didistribusikan. Pertamina juga terus berkomitmen untuk menjaga mutu BBM yang sampai ke tangan konsumen.

Pemkab Bombana Siap Bersinergi Percepatan Penyerapan Gabah/Beras

Bombana, sultranet.com - Pemkab Bombana menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung ketahanan pangan Sulawesi Tenggara dengan menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Penyerapan Gabah/Beras Tahun 2025. Upaya ini dilaksanakan guna mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras petani untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di wilayah Sultra melalui sinergi antar instansi. Rapat diselenggarakan secara virtual di Kantor Perum Bulog Bombana dan diikuti oleh berbagai pihak terkait, seperti Kasiter Korem 143/Halu Oleo, Komandan Distrik Militer Wilayah Sultra, Kepala Dinas Pertanian Wilayah Sultra, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dari Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, serta perwakilan Kanwil dan Kepala Cabang Perum Bulog se-Sultra. Rabu (05/03/2025)

Rapat koordinasi ini merupakan respons atas tantangan pemenuhan kebutuhan beras nasional yang semakin meningkat. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah strategi dan langkah konkret dibahas untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani. Kegiatan ini juga merupakan wujud sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan instansi terkait, yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani lokal, tetapi juga memastikan ketersediaan

stok beras yang memadai guna menjaga stabilitas pasokan di pasar. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sultra, yang dipimpin oleh Dr. La Ode Rusdin Jaya, SIP, M.Si, berperan penting dalam merumuskan kebijakan serta mekanisme pelaksanaan yang efisien.

Rapat tersebut juga menyoroti pentingnya peran Bulog dalam menampung gabah dan beras petani. Pihak Bulog menegaskan kesiapan untuk menerima hasil panen sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga proses penyerapan dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif maupun teknis. Diskusi dalam rapat menyentuh berbagai aspek, mulai dari pendampingan kepada petani, peningkatan kapasitas distribusi, hingga pemanfaatan teknologi informasi guna mengawasi alur penyerapan secara real-time. Melalui pendekatan terpadu ini, pemerintah berharap target CBP dapat tercapai tepat waktu, sekaligus memberikan dampak positif bagi stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Sultra.

Upaya sinergi ini tidak lepas dari tantangan yang ada, terutama dalam rangka mengoptimalkan koordinasi antar lembaga dan memastikan mekanisme penyerapan yang transparan. Oleh karena itu, rapat koordinasi diadakan sebagai forum evaluasi dan penyempurnaan strategi, yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan dinamis sektor pertanian. Keterlibatan aparat militer dan lembaga pertanian menjadi nilai tambah dalam memperkuat implementasi kebijakan, mengingat peran strategis mereka dalam menjaga keamanan dan kelancaran distribusi hasil pertanian.

“Kami menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, Bulog, dan para petani. Sinergi ini menjadi kunci dalam mencapai target penyerapan CBP dan menjaga stabilitas pasokan beras di Sultra,” ujar Dr. La Ode Rusdin Jaya dalam rapat koordinasi.

“Kami dari Pemkab Bombana siap bersinergi dengan seluruh pihak terkait. Dengan pendampingan dan koordinasi yang baik, kami optimis bahwa penyerapan gabah dan beras akan meningkat sehingga ketahanan pangan daerah dapat terjaga,” ungkap Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH.

Upaya percepatan penyerapan gabah dan beras ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan distribusi pangan di tengah fluktuasi permintaan. Dengan dukungan sinergi lintas sektor dan penggunaan teknologi informasi, proses penyerapan diharapkan dapat

berjalan lebih efisien dan responsif terhadap kondisi lapangan. Inisiatif ini juga mendapatkan sambutan positif dari para petani yang melihatnya sebagai peluang untuk mendapatkan harga jual yang lebih stabil dan peningkatan pendapatan.

Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Paparkan Visi-Misi di Rapat Paripurna DPRD

Kolaka Utara, sultranet.com - Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, MH., dan Wakil Bupati H. Jumarding, SE., menyampaikan visi-misi pembangunan daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kolaka Utara yang digelar di Gedung DPRD, Selasa (4/3/2025).

Agenda ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, dan dihadiri unsur Forkopimda, OPD, serta tokoh masyarakat setempat.

Dalam pidatonya, Bupati Kolaka Utara menegaskan bahwa visi pemerintahan periode 2025-2030 adalah Kolaka Utara sebagai Daerah yang Madani, Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ia merinci tujuh misi strategis yang menjadi pijakan utama pembangunan lima tahun ke depan.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun tata kelola pemerintahan yang baik, serta menghadirkan infrastruktur yang merata dan berkualitas,” ujar Nur Rahman Umar



Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan nilai tambah produk berbasis sumber daya alam, penguatan sektor pertanian dalam arti luas, pembangunan berwawasan lingkungan, serta penguatan semangat keberagaman dalam pembangunan.

Selain memaparkan arah pembangunan jangka panjang, Bupati juga menguraikan program prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

Beberapa program yang akan segera dijalankan antara lain Safari Ramadan dan buka puasa bersama di 15 kecamatan sebagai bentuk rekonsiliasi dan silaturahmi dengan masyarakat.

Selanjutnya Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Utara 2025-2030.

Penataan dan pembinaan birokrasi guna meningkatkan kinerja pemerintahan.

Program pembersihan Kota Lasusua dalam rangka persiapan penilaian Adipura.

Pendataan dan distribusi makanan bergizi gratis untuk masyarakat.

Optimalisasi penerangan lampu jalan dalam kota untuk meningkatkan keamanan

dan kenyamanan warga.

Wakil Bupati Kolaka Utara, H. Jumarding, menambahkan bahwa seluruh program yang dirancang tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan ini memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Kolaka Utara,” katanya.

Dukungan terhadap visi-misi yang disampaikan juga datang dari berbagai pihak.

Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, SH., menilai program yang dipaparkan menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat.

“Bupati dan Wakil Bupati telah menyusun program yang realistis dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ini adalah langkah positif untuk mewujudkan Kolaka Utara yang lebih maju,” ujarnya.



Foto bersama usai Paripurna DPRD

Syahlan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan

seluruh elemen masyarakat agar program yang telah dirancang dapat berjalan dengan maksimal.

“Kami berharap semua pihak dapat bersinergi untuk mendukung kebijakan pembangunan yang telah dirancang,” tambahnya.

Dengan penyampaian visi-misi ini, Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam membangun daerah.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaka Utara hanya bisa maju jika kita semua bergandengan tangan untuk mewujudkan cita-cita bersama,” tutup Nur Rahman Umar.

DPR-RI dan BGN Sosialisasikan Program Makan Bergizi Gratis di Kolaka Utara

Kolaka Utara, sultranet.com – DPR RI Komisi IX bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kolaka Utara. Senin (24/2/2025)

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi berkualitas guna menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas.

Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan DPR RI Komisi IX, H. Ahmad Safei, S.H., M.H., serta Imam Bachtiar Farianto, Tenaga Ahli Direktorat Kerja Sama dan Kemitraan BGN.

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara turut mendukung acara ini, yang diwakili oleh Asisten I Setda Kolaka Utara, Ir. Mukhlis Bachtiar, serta dihadiri kepala OPD, camat, kepala desa, dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, H. Ahmad Safei menegaskan bahwa Program MBG merupakan langkah nyata pemerintah dalam menanggulangi permasalahan gizi di Indonesia.

“Kami berharap masyarakat dapat memahami pentingnya konsumsi makanan bergizi dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari,” ujarnya.



Foto suasana resepsionis

Sementara itu, Imam Bachtiar Farianto menyampaikan bahwa keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, sangat diperlukan agar program ini berjalan optimal.

“Kami akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna memastikan program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini terlihat dari banyaknya peserta yang hadir dan aktif berdiskusi. Mereka berharap program MBG dapat terus berlanjut dan membawa dampak positif bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak dan remaja.



Dengan adanya program ini, pemerintah berupaya mewujudkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas melalui pola makan bergizi.

Sosialisasi ini menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran akan pentingnya pemenuhan gizi yang seimbang untuk masa depan yang lebih baik.

Jalan Rusak di Desa Lapodidi, Warga Keluhkan Minimnya Perhatian Pemkab Muna

MUNA, Sultranet.com - Kondisi jalan di Desa Lapodidi, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, kian memprihatinkan. Jalan utama yang menghubungkan

Kecamatan Kontunaga dengan Watopute ini telah mengalami kerusakan selama lebih dari satu dekade tanpa adanya perbaikan yang signifikan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna.

Warga setempat mengeluhkan akses jalan yang rusak parah, menyebabkan aktivitas ekonomi dan mobilitas mereka terganggu. Bahkan, banyak pemuda desa yang memilih merantau karena merasa tidak memiliki peluang usaha akibat buruknya infrastruktur jalan.

“Makanya kami lebih banyak keluar merantau karena jenuh dengan kondisi jalan di desa kami ini. Mau berusaha tapi jalan yang membuat kami malas bergerak. Mau bawa hasil usaha, tapi jalan yang bikin kami jenuh,” keluh AS (29), warga Kontunaga, kepada awak media, Minggu (23/2/2025).

Kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki membuat warga Desa Lapodidi merasa diabaikan oleh pemerintah daerah. Mereka berharap ada perhatian lebih dari Pemkab Muna untuk segera menangani masalah ini.

“Kami warga di Desa Lapodidi merasa tersisihkan, tidak dianggap keberadaannya. Sampai kapan kami harus merasakan ini? Kami berharap pemerintah lebih jeli melihat kondisi kami,” ujar seorang warga dengan nada kecewa.

Pada tahun 2024, Pemkab Muna melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sempat mengaspal sebagian kecil jalur tersebut. Namun, perbaikan tersebut dinilai tidak cukup karena sebagian besar jalan masih dalam kondisi rusak.

“Memang sempat diaspal, tapi itu hanya beberapa meter saja. Selebihnya tetap rusak,” ungkap warga lainnya.

Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan menyeluruh agar jalan di Desa Lapodidi dapat digunakan dengan layak, sehingga mobilitas masyarakat kembali lancar dan perekonomian desa bisa berkembang lebih baik.

GERADIN Sultra Sambut Gubernur Baru: Harapan Besar untuk Kemajuan Daerah

MUNA, Sultranet.com - Ketua Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) Sulawesi Tenggara, Kamal Rahmat, S.H., menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang baru.

Ia berharap kepemimpinan baru ini mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sultra.

“Kami mengucapkan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra yang baru dilantik. Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kamal, Jumat (21/2/2025).

Kamal menekankan pentingnya kebijakan yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia berharap pemerintah daerah segera merumuskan regulasi yang dapat mengoptimalkan potensi lokal di setiap kabupaten dan kota.

“Kepemimpinan baru harus lebih fokus membangun Sultra dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi investasi. Regulasi yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat,” katanya.

Selain sektor ekonomi, Kamal juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi. Ia mendorong pemerintah untuk lebih memberdayakan UMKM, koperasi, serta pelaku usaha lokal agar mereka bisa berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

“Pemerintah harus hadir dalam mendukung pemasaran produk lokal, termasuk melalui Perusahaan Daerah (Perusda). Dengan begitu, produk unggulan Sultra bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional,” jelasnya.

Sektor pariwisata juga menjadi perhatian GERADIN Sultra. Kamal menilai pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah, seperti Kendari, Konawe Kepulauan, Muna, Buton, dan Wakatobi, harus dilakukan secara terintegrasi

untuk meningkatkan daya tarik wisatawan.

“Pulau-pulau kecil di sekitar Wakatobi dapat dimanfaatkan sebagai penyangga wisata agar sektor ini berkembang pesat dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Kamal menegaskan bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan baru.

Ia menyatakan kesiapan GERADIN Sultra untuk mendukung langkah-langkah pemerintah yang berpihak pada kemajuan daerah.

“Kami siap mendukung kebijakan yang berorientasi pada kemajuan Sultra. Selamat bertugas, semoga Sulawesi Tenggara semakin maju dan berjaya!” pungkasnya.

Kolaka Utara Bahas Evaluasi STQH dan Penentuan Tuan Rumah MTQ 2026

Kolaka Utara, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menggelar rapat Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) di Aula Pertemuan Desa Bahari, Kecamatan Tolala, Selasa (20/2/2025).

Rapat ini membahas evaluasi penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis (STQH) ke-II serta persiapan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tahun 2026.

Plt. Staf Ahli Bupati Kolaka Utara, Murni Baso, yang memimpin rapat mewakili pemerintah daerah, menyampaikan permohonan maaf dari Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara yang berhalangan hadir karena menghadiri pelantikan gubernur, bupati, dan wali kota di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menegaskan pentingnya peran LPTQ dalam meningkatkan syiar Islam di daerah.

“Pemerintah daerah sangat mendukung pengembangan tilawatil quran. STQH bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi juga menjadi bagian dari pembinaan generasi muda yang cinta Al-Qur’an,” ujar Murni Baso.

Camat Tolala, Drs. Masdar, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia dan peserta STQH ke-II yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua kafilah yang telah mengikuti STQH ke-II ini. Kami juga memohon maaf apabila dalam penyambutan, pembukaan, maupun penutupan masih ada kekurangan,” ucapnya.



Sementara itu, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kolaka Utara, H. Alimuddin, S.Ag., M.H., mengungkapkan bahwa Kolaka Utara memiliki peluang besar untuk menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di masa mendatang.

“Kemungkinan besar kita akan menjadi tuan rumah MTQ provinsi. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah, terutama dalam hal kebijakan anggaran, sangat diperlukan,” tuturnya.

Plt. Camat Kodeoha, yang juga Kabid IKP dan Kehumasan Diskominfo Kolaka Utara, Syahlan Launu, menambahkan bahwa STQH dan pemilihan Duta Lasqi 2025 di Kecamatan Tolala menjadi momentum penting dalam menyambut bulan Ramadan 1446 Hijriah.

“Kegiatan ini bukan hanya untuk mencari juara, tetapi juga sebagai ajang mempererat silaturahmi antar-kafilah dalam bingkai Kolaka Utara Madani,” ujarnya.

Selain evaluasi STQH, rapat tersebut juga membahas penentuan tuan rumah MTQ 2026. Sejumlah kecamatan yang menjadi alternatif sebagai tuan rumah antara lain Ngapa, Katoi, dan Wawo, dengan mempertimbangkan sistem zonasi I dan II guna pemerataan penyelenggaraan.

Presiden Prabowo Lantik Bupati dan Wakil Bupati Bombana Periode 2025-2030

Jakarta, sultranet.com – Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Prabowo Subianto, secara resmi melantik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana periode 2025-2030 bersama kepala daerah lainnya hasil Pilkada 2024. Prosesi pelantikan serentak ini berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dan menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang Kepala Negara melantik secara langsung 961 kepala daerah dari 481 wilayah di Indonesia. Rinciannya, sebanyak 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota. Kamis, 20 Februari 2025.

Pelantikan ini menandai dimulainya masa jabatan bagi pasangan terpilih di

Bombana, yakni Ir. H. Burhanuddin, M.Si sebagai Bupati dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si sebagai Wakil Bupati. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri sejumlah pejabat negara serta tamu undangan dari berbagai kalangan.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo berpesan agar para kepala daerah yang baru dilantik menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan komitmen untuk memajukan daerah masing-masing serta mensejahterakan rakyat. Ia menegaskan bahwa kepala daerah adalah pelayan rakyat yang harus bekerja tanpa membeda-bedakan latar belakang masyarakat.

“Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama Negara dan Bangsa Indonesia bahwa saudara dipilih untuk menjadi pelayan rakyat, abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat, menjaga kesejahteraan mereka, dan berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Walaupun kita berasal dari partai, agama, dan suku yang berbeda-beda, kita tetap satu dalam keluarga besar Nusantara, Republik Indonesia. Kita adalah keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika,” tegas Presiden dalam pidatonya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, MM.Kes., turut hadir menyaksikan pelantikan tersebut. Ia menyatakan optimismenya bahwa kepemimpinan Burhanuddin dan Ahmad Yani akan mampu menjalankan amanah yang diberikan Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana.

“Insya Allah, kepemimpinan Bapak Burhanuddin dan Ahmad Yani akan membawa kemajuan bagi Bombana dengan tetap menjaga keharmonisan dalam keberagaman masyarakatnya,” ujar Sunandar. Ia juga mengucapkan selamat kepada pasangan tersebut atas pelantikan mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025-2030.

Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Bombana memasuki era baru dalam kepemimpinan daerah. Harapan besar disematkan pada pasangan Burhanuddin dan Ahmad Yani untuk menghadirkan kebijakan yang pro-rakyat serta membawa perubahan positif bagi daerah tersebut. Program pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan sektor ekonomi lokal menjadi tantangan utama yang diharapkan dapat diwujudkan selama masa jabatan mereka.

Masyarakat Bombana pun menyambut pelantikan ini dengan harapan besar.

Berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda, dan pelaku usaha, menaruh ekspektasi agar pemimpin baru ini mampu merealisasikan visi dan misinya untuk kemajuan daerah. Dukungan penuh diharapkan dari seluruh elemen masyarakat agar pemerintahan yang baru berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Bombana.

Bupati dan Wakil Bupati Bombana terpilih, Burhanuddin-Ahmad Yani Jalani Pemeriksaan Kesehatan Jelang Pelantikan

JAKARTA, sultranet.com - Bupati dan Wakil Bupati Bombana terpilih, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si, menjalani pemeriksaan kesehatan di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Senin (17/2/2025). Pemeriksaan ini merupakan bagian dari rangkaian tahapan sebelum pelantikan kepala daerah serentak yang dijadwalkan pada 20 Februari 2025 di Istana Negara.

Burhanuddin dan Ahmad Yani bergabung dengan 242 kepala daerah terpilih lainnya yang menjalani pemeriksaan kesehatan hari ini. Sementara itu, sehari sebelumnya, sebanyak 239 kepala daerah dari wilayah Sumatera dan Jawa telah lebih dulu mengikuti pemeriksaan yang sama.

Sesuai jadwal yang diterima, pasangan pemenang Pilkada Bombana 2024 itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada sesi kedua, yakni pukul 13.00 WIB. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara bertahap dalam tiga sesi, yaitu pukul 08.00-10.00 WIB, 10.00-12.00 WIB, dan 13.00-15.00 WIB.

Menurut Bima Arya, pemeriksaan kesehatan ini bersifat dasar, mencakup tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. "Mereka hanya menjalani pemeriksaan

kesehatan mendasar karena sebelumnya sudah menyampaikan hasil medical check-up dari daerah masing-masing. Jadi, yang dilakukan di sini hanya pemeriksaan lanjutan yang lebih praktis,” ujarnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, para kepala daerah terpilih juga diberikan pengarahan terkait tahapan pelantikan. Untuk efisiensi, pemeriksaan dilakukan di Gedung Kemendagri, bukan di rumah sakit. “Kami ingin memastikan semua kepala daerah dalam kondisi prima menjelang pelantikan dan pembekalan,” tambah Bima.

Sebelum menjalani pemeriksaan, Burhanuddin meminta doa agar seluruh proses registrasi dan pemeriksaan berjalan lancar. “Pagi menjelang siang, kami bersiap menuju Kemendagri untuk registrasi dan pemeriksaan kesehatan. Mohon doanya semoga semua berjalan lancar,” ungkapnya.

Pelantikan kepala daerah serentak ini akan menjadi momen penting bagi para pemimpin daerah dalam mengemban amanah baru. Dengan selesainya tahapan pemeriksaan kesehatan, Burhanuddin dan Ahmad Yani semakin dekat menuju pelantikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bombana periode 2025-2030.

Kapolres Bombana Ajak Tokoh Agama dan Adat Bersinergi Jaga Kamtibmas

Bombana, sultranet.com - Kapolres Bombana, AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K., menggelar silaturahmi dengan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bombana.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Rekonfu Polres Bombana pada Selasa (11/2/2025) ini bertujuan memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kepada awak media sultranet.com, AKBP Wisnu Hadi menegaskan bahwa menjaga kamtibmas bukan hanya tugas kepolisian, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

“Kami ingin membangun kerja sama yang erat dengan para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat agar tercipta situasi yang aman dan kondusif di Bombana,” ujarnya.

Ia juga menyoroti keberagaman suku yang ada di Bombana, baik suku asli Moronene maupun pendatang, yang selama ini hidup berdampingan dengan harmonis. Menurutnya, kebersamaan ini menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah.



Foto bersama Kapolres, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Selain perkenalan dan diskusi mengenai kondisi kamtibmas di wilayah hukum Polres Bombana, pertemuan ini juga membahas penguatan nilai-nilai keagamaan dan solidaritas sosial.

“Dengan keimanan yang kuat, kita bisa membentuk karakter masyarakat yang

lebih baik. Ini akan berdampak positif terhadap keamanan dan ketertiban,” tambahnya.

Kapolres juga menyampaikan komitmen institusi yang dipimpinnya itu untuk melakukan perbaikan-perbaikan internal agar kepolisian lebih dekat dan dicintai masyarakat.

Silaturahmi ini turut dihadiri Waka Polres Bombana, Kompol Reda Irfanda, S.H., S.I.K., M.H., serta para pejabat utama Polres Bombana. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dalam menjaga kamtibmas di Bombana.

Pertemuan berlangsung dengan lancar dan kondusif, menandai komitmen kuat antara kepolisian dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang aman dan harmonis.